JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari
Volume 8, Nomor 1, Juli-Desember 2026
DOI: https://doi.org/10.31539/ramacd77

PENGEMBANGAN EKOSISTEM KEPEMUDAAN TERPADU BERBASIS OUTCOME

Budi Hartoyo[1]
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu[1]
budihartoyo01@gmail.com[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi strategis, kesenjangan, akar masalah, serta alternatif kebijakan pembangunan kepemudaan di Provinsi Bengkulu dan merumuskan kerangka kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi outcome. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis data sekunder yang bersumber dari statistik resmi, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), regulasi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan melalui identifikasi masalah, analisis kesenjangan, problem tree analysis, analisis policy gap, perumusan tiga alternatif kebijakan, dan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dengan kriteria efektivitas, kelayakan fiskal, kelayakan kelembagaan, pemerataan, keberlanjutan, dan risiko implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPP Provinsi Bengkulu sebesar 57,33 pada 2023 dan 57,17 pada 2024. Pada 2024, domain pendidikan mencapai 73,33, kesehatan dan kesejahteraan 62,50, lapangan dan kesempatan kerja 50,00, partisipasi dan kepemimpinan 43,33, serta gender dan diskriminasi 56,67. Kesenjangan utama ditemukan antara kapasitas dan kesempatan ekonomi, keterampilan dan transisi ekonomi, keterlibatan dan pengaruh, kebijakan sektoral dan integrasi sistem, serta output dan outcome. MCDA menghasilkan nilai 4,25 untuk alternatif pengembangan ekosistem kepemudaan terpadu berbasis outcome. Kerangka tersebut mengintegrasikan data pemuda, keterampilan, pekerjaan dan kewirausahaan, partisipasi bermakna, tata kelola lintas sektor, serta pembiayaan dan monitoring-evaluasi berbasis outcome.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, *Outcome,* Partisipasi Bermakna, Pembangunan Kepemudaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategic conditions, gaps, root causes, and policy alternatives for youth development in Bengkulu Province and to formulate an integrated outcome-oriented policy framework. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach based on secondary data from official statistics, the Youth Development Index, regulations, policy documents, and previous studies. The analysis consists of problem identification, gap analysis, problem tree analysis, policy gap analysis, formulation of three policy alternatives, and Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) using effectiveness, fiscal feasibility, institutional feasibility, equity, sustainability, and implementation risk as criteria. The findings show that Bengkulu's Youth Development Index was 57.33 in 2023 and 57.17 in 2024. In 2024, the education domain reached 73.33, health and welfare 62.50, employment and employment opportunities 50.00, participation and leadership 43.33, and gender and discrimination 56.67. Major gaps were identified between capacity and economic opportunities, skills and economic transition, participation and influence, sectoral policies and system integration, and outputs and outcomes. MCDA produced a score of 4.25 for the

integrated outcome-based youth ecosystem alternative. The proposed framework integrates youth data, skills, employment and entrepreneurship, meaningful participation, cross-sector governance, and outcome-based financing and monitoring and evaluation.

Keywords: *Meaningful Participation, Outcomes, Public Policy, Youth Development.*

PENDAHULUAN

Pemuda merupakan kelompok strategis dalam pembangunan karena berada pada fase pembentukan kapasitas, produktivitas, kemandirian, kepemimpinan, dan peran sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kerangka pembangunan kepemudaan mencakup penyadaran, pemberdayaan, pengembangan, koordinasi, kemitraan, organisasi, peran masyarakat, dan pendanaan. Dengan karakter tersebut, pembangunan kepemudaan tidak dapat dipandang sebagai urusan satu perangkat daerah, tetapi sebagai agenda lintas sektor yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pekerjaan, kewirausahaan, partisipasi, dan tata kelola pembangunan.

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, struktur demografi menyediakan peluang pembangunan, tetapi peluang demografis tidak otomatis menghasilkan keuntungan pembangunan. SUPAS 2025 mencatat jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 2.140.142 jiwa. Potensi tersebut perlu dikonversi melalui pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, kewirausahaan, dan partisipasi sosial. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan kepemudaan tidak cukup didasarkan pada banyaknya kegiatan atau jumlah peserta, tetapi perlu dilihat dari perubahan kapasitas, akses ekonomi, keberlanjutan usaha, kualitas partisipasi, dan outcome pembangunan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memberikan kerangka untuk melihat capaian pembangunan pemuda melalui beberapa domain. Data Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan bahwa IPP Provinsi Bengkulu meningkat dari 54,83 pada 2022 menjadi 57,33 pada 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 57,17 pada 2024. Pada 2024, capaian domain pendidikan sebesar 73,33, kesehatan dan kesejahteraan 62,50, lapangan dan kesempatan kerja 50,00, partisipasi dan kepemimpinan 43,33, serta gender dan diskriminasi 56,67 (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2026). Perbedaan antardomain tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat, tetapi menunjukkan adanya ruang penguatan dalam menghubungkan kapasitas pemuda dengan outcome ekonomi dan sosial.

Kesenjangan antara pendidikan dan kesempatan ekonomi menjadi penting karena pendidikan dan keterampilan tidak otomatis menghasilkan pekerjaan atau pendapatan. Schultz (1961) memandang pendidikan dan keterampilan sebagai investasi modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas. Dalam konteks pembangunan pemuda, investasi tersebut memerlukan mekanisme yang menghubungkan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja. Putra (2023) menunjukkan pentingnya keterkaitan pendidikan vokasional dengan dunia kerja dan pembaruan kompetensi, sedangkan Al Ayyubi et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan melalui Program Kartu Prakerja dapat meningkatkan partisipasi pasar kerja, tetapi tidak otomatis meningkatkan pendapatan. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk melihat transisi dari keterampilan menuju pekerjaan atau usaha sebagai suatu rangkaian kebijakan.

Kewirausahaan juga memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Hamzah et al. (2023) menekankan pentingnya keterampilan kewirausahaan, basis data, integrasi, dan prioritas strategi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Di Bengkulu, Putra et al. (2026) menunjukkan bahwa keberhasilan wirausaha muda dipengaruhi oleh faktor mikro dan makro. Artinya, dukungan kewirausahaan tidak cukup berhenti pada pelatihan atau bantuan, tetapi perlu menghubungkan kompetensi, pembiayaan, produksi, pemasaran, akses pasar, jejaring, dan pendampingan.

Selain dimensi ekonomi, pembangunan kepemudaan berkaitan dengan posisi pemuda sebagai subjek pembangunan. Partisipasi bermakna bukan hanya kehadiran dalam forum, tetapi mencakup akses informasi, penyampaian gagasan, kesempatan agar gagasan dipertimbangkan, pengaruh terhadap keputusan, dan tindak lanjut. Checkoway dan Aldana (2013) menempatkan partisipasi pemuda dalam konteks perubahan komunitas, sedangkan Arnstein (1969) menunjukkan bahwa kualitas partisipasi berkaitan dengan tingkat pengaruh warga terhadap proses keputusan. Dalam konteks Bengkulu, domain partisipasi dan kepemimpinan meningkat dari 40,00 pada 2022–2023 menjadi 43,33 pada 2024, tetapi masih menunjukkan kebutuhan penguatan.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan kepemudaan bukan sekadar kekurangan program. Persoalan yang lebih mendasar adalah keterhubungan antarkomponen kebijakan. Pendidikan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, partisipasi, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berada pada fungsi yang berbeda. Tanpa tujuan bersama, data terintegrasi, indikator hasil, dan koordinasi lintas sektor, keberhasilan indikator sektoral belum tentu menghasilkan outcome pembangunan pemuda secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi strategis dan kesenjangan pembangunan kepemudaan di Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi akar masalah dan policy gap, menilai alternatif kebijakan, serta merumuskan kerangka pengembangan ekosistem kepemudaan terpadu berbasis outcome.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dalam bentuk kajian kebijakan berbasis bukti. Unit analisis penelitian adalah kebijakan pembangunan kepemudaan di Provinsi Bengkulu, khususnya keterhubungan antara kapasitas pemuda, kesempatan ekonomi, partisipasi, tata kelola, pembiayaan, dan outcome pembangunan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari statistik resmi, publikasi Indeks Pembangunan Pemuda, regulasi kepemudaan, dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan, artikel jurnal, hasil penelitian mengenai pendidikan, keterampilan, ketenagakerjaan, kewirausahaan dan partisipasi, serta kajian lembaga pemerintah dan internasional. Data utama meliputi statistik BPS Provinsi Bengkulu, publikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, regulasi terkait kepemudaan, dan literatur yang relevan.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi kondisi strategis berdasarkan data demografi dan IPP. Kedua, analisis kesenjangan dengan membandingkan kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan. Ketiga, analisis akar masalah menggunakan problem tree analysis untuk menelusuri hubungan antara masalah, penyebab, dan akar masalah. Keempat, identifikasi policy gap yang menunjukkan keterputusan antara kebijakan dan outcome. Kelima, perumusan tiga alternatif kebijakan berdasarkan akar masalah. Keenam, penilaian alternatif

menggunakan *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dengan metode weighted scoring.

MCDA menggunakan enam kriteria, yaitu efektivitas, kelayakan fiskal, kelayakan kelembagaan, pemerataan manfaat, keberlanjutan, dan risiko implementasi. Masing-masing alternatif diberi skor 1–5. Untuk kriteria risiko implementasi, skor yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih rendah. Nilai akhir diperoleh dari penjumlahan skor yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Bobot ditetapkan berdasarkan kepentingan kriteria terhadap karakteristik masalah. Penilaian merupakan structured policy judgement yang didasarkan pada temuan analisis dan kondisi implementasi, bukan ukuran statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Strategis Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Bengkulu

Pemuda merupakan modal strategis pembangunan daerah, tetapi keberadaan penduduk usia produktif perlu diikuti kemampuan sistem pembangunan dalam mengonversinya menjadi produktivitas, kesempatan ekonomi, kemandirian, dan partisipasi. Data IPP menunjukkan bahwa capaian pembangunan pemuda Bengkulu masih belum seimbang antardomain.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu, 2022–2024

Domain	2022	2023	2024
Pendidikan	73,33	73,33	73,33
Kesehatan & kesejahteraan	57,50	65,00	62,50
Lapangan & kesempatan kerja	50,00	55,00	50,00
Partisipasi & kepemimpinan	40,00	40,00	43,33
Gender & diskriminasi	53,33	53,33	56,67
IPP	54,83	57,33	57,17

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (2026).

Data menunjukkan pendidikan merupakan domain dengan capaian paling tinggi dan relatif stabil, sedangkan lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan merupakan domain dengan capaian lebih rendah. Temuan ini perlu dibaca sebagai indikasi kesenjangan, bukan sebagai bukti hubungan kausal. Kapasitas pendidikan yang relatif tinggi belum otomatis menghasilkan kesempatan ekonomi yang sepadan. Demikian pula, peningkatan partisipasi belum otomatis berarti meningkatnya pengaruh pemuda dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan tersebut sejalan dengan perspektif modal manusia yang menempatkan pendidikan dan keterampilan sebagai investasi produktif (Schultz, 1961), tetapi sekaligus menunjukkan pentingnya mekanisme konversi kapasitas menjadi outcome. Putra (2023) menunjukkan bahwa pendidikan vokasional perlu dikaitkan dengan dunia kerja, sementara Al Ayyubi et al. (2023) menunjukkan keterbatasan efek pelatihan terhadap pendapatan apabila intervensi tidak dilanjutkan ke tahap transisi ekonomi. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan perlu bergerak dari logika kegiatan menuju rantai hasil: pendidikan dan pelatihan → kompetensi → pemanfaatan kompetensi → produktivitas → pekerjaan atau usaha → pendapatan.

Kesenjangan Pembangunan Kepemudaan

Tabel 2. Analisis Kesenjangan Pembangunan Kepemudaan

Kondisi yang diharapkan	Kondisi teridentifikasi	Kesenjangan
Potensi demografis menjadi produktivitas	Potensi belum otomatis menghasilkan outcome	Konversi potensi–outcome
Pendidikan menghasilkan kapasitas relevan	Pendidikan relatif lebih baik, kesempatan kerja lebih rendah	Kapasitas–ekonomi
Pelatihan menghasilkan transisi ekonomi	Pelatihan tidak otomatis menghasilkan pekerjaan/pendapatan berkualitas	Skill–job/business
Pemuda terlibat dalam pembangunan	Partisipasi masih perlu diperkuat	Kehadiran–pengaruh
Program lintas sektor menghasilkan outcome bersama	Kebijakan pemuda bersifat multidimensi	Sektoral–integratif
Data mendukung keputusan	IPP belum menjawab seluruh kebutuhan targeting operasional	Data–keputusan
Program menghasilkan perubahan	Pengukuran masih mudah berfokus pada output	Output–outcome

Sumber: Analisis Penulis Berdasarkan Hasil Diagnosis Kebijakan (2026).

Kesenjangan pembangunan pemuda bersifat vertikal dan horizontal. Kesenjangan vertikal muncul antara input, proses, output, dan outcome, sedangkan kesenjangan horizontal muncul antara pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, partisipasi, dan tata kelola. Dengan demikian, pertanyaan penting bukan hanya apakah setiap sektor telah menjalankan program, tetapi apakah intervensi antarsektor saling terhubung untuk menghasilkan perubahan pada kehidupan pemuda.

Kesenjangan pertama adalah antara kapasitas dan kesempatan ekonomi. Capaian pendidikan 73,33 pada 2024 lebih tinggi daripada capaian lapangan dan kesempatan kerja sebesar 50,00. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya memperkuat hubungan pendidikan, kompetensi, pemanfaatan kompetensi, produktivitas, dan pendapatan. Kesenjangan kedua adalah antara keterampilan dan transisi ekonomi. Pelatihan tidak otomatis menghasilkan pekerjaan atau usaha yang berkualitas sehingga diperlukan hubungan antara keterampilan, informasi peluang, pengalaman atau sertifikasi, penempatan, produktivitas, dan pendapatan.

Kesenjangan ketiga adalah antara keterlibatan dan pengaruh. Partisipasi dan kepemimpinan meningkat menjadi 43,33 pada 2024, tetapi kualitas partisipasi perlu dilihat dari apakah suara pemuda benar-benar dipertimbangkan dan menghasilkan tindak lanjut. Kesenjangan keempat adalah antara kebijakan sektoral dan pembangunan pemuda sebagai sistem. Pembangunan kepemudaan melibatkan banyak urusan sehingga membutuhkan tujuan dan outcome bersama. Kesenjangan kelima adalah antara output dan outcome karena jumlah kegiatan atau peserta belum cukup menggambarkan perubahan kapasitas, pekerjaan, pendapatan, keberlanjutan usaha, atau pengaruh pemuda.

Akar Masalah dan Policy Gap

Tabel 3. Analisis Akar Masalah Dan Policy GAP

Akar masalah	Manifestasi	Policy Gap
Fragmentasi tata kelola	Program berjalan menurut sektor	Belum optimalnya outcome bersama
Data belum optimal	Data belum sepenuhnya menjadi targeting	Data belum terhubung dengan keputusan
Skill–job mismatch	Pelatihan belum selalu sesuai demand	Supply kompetensi belum terhubung dengan demand
Rantai ekonomi belum lengkap	Skill, modal, pasar dan mentoring terpisah	Dukungan belum end-to-end
Partisipasi belum substantif	Keterlibatan tidak selalu memengaruhi keputusan	Attendance–influence gap
M&E berorientasi output	Jumlah kegiatan lebih mudah diukur	Output–outcome gap

Sumber: Analisis Penulis (2026).

Analisis menunjukkan bahwa akar masalah utama bukan ketiadaan program tertentu, melainkan belum optimalnya mekanisme yang menghubungkan berbagai komponen pembangunan pemuda menjadi satu rangkaian hasil. Fragmentasi tata kelola membuat intervensi berjalan sektoral; pemanfaatan data yang belum optimal membatasi ketepatan targeting; ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan ekonomi membatasi transisi menuju pekerjaan atau usaha; dukungan kewirausahaan yang tidak terintegrasi membuat rantai dukungan belum lengkap; mekanisme partisipasi yang belum berorientasi pengaruh membatasi kontribusi pemuda; sedangkan monitoring dan evaluasi yang berorientasi output membatasi kemampuan pemerintah mengetahui perubahan yang dihasilkan.

Temuan ini memperlihatkan policy gap antara desain kebijakan dan outcome. Pada level tata kelola, kebijakan perlu bergerak dari koordinasi administratif menuju outcome bersama. Pada level data, IPP perlu dilengkapi informasi operasional mengenai karakteristik pemuda, keterampilan, lokasi kesenjangan, potensi ekonomi, dan efektivitas intervensi. Pada level ekonomi, supply kompetensi perlu dihubungkan dengan demand dunia kerja dan peluang usaha. Pada level partisipasi, mekanisme perlu bergerak dari attendance menuju influence. Pada level kinerja, rantai manajemen perlu diperkuat dari data → diagnosis → prioritas → program → pembiayaan → implementasi → output → outcome → evaluasi → perbaikan.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan akar masalah, dirumuskan tiga alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah penguatan tata kelola dan kelembagaan kepemudaan yang berfokus pada koordinasi lintas OPD, arah kebijakan terintegrasi, basis data, pembagian peran, monitoring-evaluasi, serta integrasi isu kepemudaan dalam perencanaan dan penganggaran. Alternatif kedua adalah penguatan keterampilan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan pemuda yang berfokus pada pemetaan kebutuhan keterampilan, pelatihan sesuai dunia kerja, sertifikasi, magang, job matching, informasi pekerjaan, inkubasi, mentoring, pembiayaan, pasar, dan pemasaran digital.

Alternatif ketiga adalah pengembangan ekosistem kepemudaan terpadu berbasis outcome. Alternatif ini tidak menambah program secara terpisah, tetapi menghubungkan program yang relevan dalam satu kerangka hasil. Enam komponen utamanya adalah Data Pemuda; Pemuda Terampil; Employment and Entrepreneurship; Meaningful Youth Participation; Cross-Sector Governance; serta Outcome-Based Financing and Monitoring and Evaluation.

Penilaian Alternatif Kebijakan dengan MCDA

Tabel 4. Hasil Penilaian Alternatif Kebijakan dengan MCDA

Kriteria	Bobot	A1	A2	A3
Efektivitas	25%	0,75	1,00	1,25
Kelayakan fiskal	15%	0,60	0,60	0,45
Kelayakan kelembagaan	15%	0,60	0,45	0,60
Pemerataan manfaat	15%	0,45	0,45	0,75
Keberlanjutan	15%	0,75	0,60	0,75
Risiko implementasi	15%	0,60	0,45	0,45
TOTAL	**100%**	**3,75**	**3,55**	**4,25**

Sumber: Analisis Penulis Berdasarkan Metode Weighted Scoring/MCDA (2026).

Penilaian menghasilkan nilai A1 sebesar 3,75, A2 sebesar 3,55, dan A3 sebesar 4,25. Nilai tersebut merupakan hasil structured policy judgement berdasarkan enam kriteria yang telah ditetapkan. Dalam kerangka analisis ini, alternatif ekosistem terpadu berbasis outcome memiliki kesesuaian paling komprehensif dengan akar masalah karena menghubungkan tata kelola, data, keterampilan, kesempatan ekonomi, kewirausahaan, partisipasi, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi dalam satu kerangka hasil.

Secara substantif, alternatif pertama penting sebagai fondasi tata kelola, sedangkan alternatif kedua menjadi penggerak produktivitas dan kemandirian ekonomi. Alternatif ketiga berfungsi sebagai kerangka integrasi yang menghubungkan kedua dimensi tersebut dengan partisipasi dan manajemen kinerja. Dengan demikian, pengembangan ekosistem tidak dimaknai sebagai pembentukan seluruh program baru, tetapi sebagai perubahan cara kerja agar intervensi yang sudah ada saling terhubung.

Kerangka Ekosistem Kepemudaan Terpadu Berbasis Outcome

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka kebijakan perlu mengintegrasikan enam komponen. Pertama, Data Pemuda, yaitu pembangunan baseline dan segmentasi pemuda sebagai dasar penetapan sasaran. Kedua, Pemuda Terampil, yaitu penguatan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Ketiga, Employment and Entrepreneurship, yaitu penghubungan keterampilan dengan pekerjaan, usaha, pasar, pembiayaan, dan mentoring. Keempat, Meaningful Youth Participation, yaitu penguatan keterlibatan pemuda sampai pada tahap pengaruh terhadap keputusan. Kelima, Cross-Sector Governance, yaitu koordinasi lintas sektor dengan outcome bersama. Keenam, Outcome-Based Financing and M&E, yaitu pembiayaan dan evaluasi yang diarahkan pada hasil, bukan hanya jumlah kegiatan.

Kerangka tersebut mengubah orientasi pembangunan dari program sektoral menjadi ekosistem lintas sektor; dari jumlah kegiatan menuju outcome; dari pelatihan menuju kompetensi dan transisi ekonomi; dari kehadiran dalam forum menuju pengaruh terhadap keputusan; dari data sebagai laporan menuju data sebagai instrumen

pengambilan keputusan; dan dari pembiayaan berbasis kegiatan menuju pembiayaan berbasis prioritas dan hasil.

Secara implementatif, kerangka tersebut dirancang bertahap pada 2027–2030. Tahap fondasi pada 2027 diarahkan pada baseline, sistem data, outcome, indikator, dan mekanisme koordinasi. Tahap integrasi pada 2028 diarahkan pada integrasi kebijakan dan intervensi lintas OPD berdasarkan outcome bersama. Tahap perluasan pada 2029 diarahkan pada perluasan intervensi yang terbukti efektif dan penguatan kemitraan. Tahap institusionalisasi pada 2030 diarahkan pada pelembagaan pendekatan outcome dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja daerah.

Tabel 5. Tahapan Implementasi Kebijakan 2027–2030

Tahap	Tahun	Fokus	Hasil yang diharapkan
Fondasi	2027	Baseline, sistem data, outcome, indikator, koordinasi	Dasar empiris untuk sasaran, prioritas dan target
Integrasi	2028	Integrasi intervensi lintas OPD berdasarkan outcome bersama	Program lintas sektor bekerja dalam satu kerangka hasil
Perluasan	2029	Memperluas intervensi efektif dan kemitraan	Cakupan dan kualitas intervensi meningkat
Institusionalisasi	2030	Melembagakan pendekatan outcome	Ekosistem menjadi bagian mekanisme pembangunan berkelanjutan

Sumber: Analisis penulis (2026).

Indikator Kinerja dan Monitoring-Evaluasi

Tabel 6. Indikator Kinerja, Monitoring dan Evaluasi

Dimensi	Indikator utama	Jenis
Data pemuda	Ketersediaan baseline dan profil pemuda terintegrasi	Output
Pendidikan dan keterampilan	Persentase pemuda memperoleh kompetensi relevan dan/atau sertifikasi	Output/Outcome
Pekerjaan dan kesempatan	Persentase pemuda bekerja atau memperoleh akses pekerjaan produktif	Outcome
Kewirausahaan	Tingkat keberlanjutan usaha pemuda	Outcome
Partisipasi dan kepemimpinan	Persentase usulan pemuda yang memperoleh respons/tindak lanjut	Outcome
Tata kelola	Proporsi program lintas OPD menggunakan outcome bersama	Output
Dampak pembangunan	Perubahan capaian IPP Provinsi Bengkulu	Outcome/Dampak

Sumber: Analisis penulis (2026).

Monitoring diarahkan dilakukan secara triwulanan, evaluasi tahunan menilai output dan perkembangan outcome, evaluasi tengah periode pada 2029 digunakan untuk menentukan intervensi yang diperluas atau diperbaiki, sedangkan evaluasi akhir 2030 digunakan untuk menilai efektivitas keseluruhan. Target kuantitatif final perlu ditetapkan setelah baseline 2027 tersedia.

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan di Provinsi Bengkulu menghadapi kesenjangan antara potensi dan outcome pembangunan. IPP Provinsi Bengkulu berada pada 57,17 pada 2024 dengan kesenjangan terutama pada lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan. Persoalan utama bukan

semata-mata kekurangan program, melainkan belum optimalnya keterhubungan antarkomponen kebijakan dalam mengonversi kapasitas pemuda menjadi produktivitas, kemandirian ekonomi, dan partisipasi bermakna.

Akar masalah yang ditemukan meliputi fragmentasi tata kelola lintas sektor, pemanfaatan data yang belum optimal, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan ekonomi, dukungan kewirausahaan yang belum terintegrasi, partisipasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pengaruh, serta monitoring dan evaluasi yang masih berorientasi output. Penilaian MCDA terhadap tiga alternatif menghasilkan nilai A1 sebesar 3,75, A2 sebesar 3,55, dan A3 sebesar 4,25. Analisis tersebut mendukung pengembangan ekosistem kepemudaan terpadu berbasis outcome sebagai kerangka integrasi kebijakan.

Kerangka yang dihasilkan mengintegrasikan data pemuda, keterampilan, pekerjaan dan kewirausahaan, partisipasi bermakna, tata kelola lintas sektor, serta pembiayaan dan monitoring-evaluasi berbasis outcome. Implementasi dirancang bertahap pada 2027–2030 melalui fase fondasi, integrasi, perluasan, dan institusionalisasi.

SARAN

Pengembangan kebijakan kepemudaan di Provinsi Bengkulu perlu diawali dengan penyusunan baseline dan profil pemuda yang lebih operasional untuk mendukung targeting. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor dan menyepakati outcome bersama agar program sektoral dapat saling terhubung. Pada aspek ekonomi, intervensi keterampilan dan kewirausahaan perlu dirancang sampai pada tahap akses pekerjaan, pasar, pembiayaan, pendampingan, dan keberlanjutan usaha. Pada aspek partisipasi, perlu dikembangkan mekanisme yang dapat menunjukkan apakah gagasan pemuda memperoleh respons dan tindak lanjut dalam proses kebijakan.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji kerangka ekosistem yang dihasilkan secara empiris, terutama melalui penyusunan baseline 2027, pengukuran indikator outcome, pemetaan program dan pembiayaan lintas OPD, serta evaluasi efektivitas implementasi pada setiap tahap 2027–2030.

DAFTAR PUSTAKA

Al Ayyubi, M. S., Pratomo, D. S., & Prasetyia, F. (2023). Does pre-employment card program improve Indonesian youth labor market performance in pandemic era? *Cogent Economics & Finance*, *11*(2). https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267752

Albert., Gonawi, Z., Utomo, C., HAsan, D. P., Khu, D. C. (2026). The Role of Youth Participation and Leadership in Enhancing the Social Contribution of Youth Pioneers in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*. *9*(1). https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v9i1.9429

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bengkulu, 2026*. Diakses pada 22 November 2026, dari bengkulu. https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/

jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-bengkulu--2020.html?year=2026

Checkoway, B. N., & Gutierrez, L. M. (2006). Youth Participation and Community Change: An Introduction. *Journal of Community Practice*, *14*(1–2), 1–9. https://doi.org/10.1300/J125v14n01_01

Hamzah, H., Suhendi, S., & Burda, A. (2023). Analysis of policies and strategies for youth entrepreneurship development. JIMFE: Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi. 9(1). https://doi.org/10.34203/jimfe.v9i1.7172

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (21 Januari 2026). Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. https://satudata.kemenpora.go.id/produk/publikasi/detail/10/laporan-indeks-pembangunan-pemuda-2025

Kring, S., Breglia, M. G.(2015). Jobs and skills for youth: Review of policies for youth employment in Indonesia. International Labour Organization. https://www.ilo.org/media/443871/download

OECD/ADB (2020), *Employment and Skills Strategies in Indonesia*, OECD Reviews on Local Job Creation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/dc9f0c7c-en.

Putra, F. (2023). Reducing youth unemployment in Indonesia: Identifying financial strategy for technical and vocational education and training. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 16*(1), 150–169. https://doi.org/10.15294/jejak.v16i1.40633

Putra, S. A., Soleh, A., & Yanti, R. T. (2026). The Success of Young Entrepreneurs in Bengkulu City: An Analysis of Micro and Macro Factors. *Journal of Accounting and Management*, *3*(1), 35–44. https://doi.org/10.70963/jam.v3i1.1174

Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review, 51,* 1-17. https://doi.org/10.3386/w0033